

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
DIDESA BANJARBARU KECAMATAN DAHA SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat guna meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai



OLEH :
JUMIATI
NPM: 2022523

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
AMUNTAI
2026**

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama

Nama : JUMIATI
NPM : 2022523
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) DIDESA BANJARBARU KECAMATAN
DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing skripsi pada program studi administrasi publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, April 2026

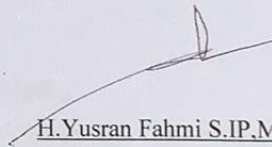
Pembimbing 1



Barkatullah, S.Sos, M.A.

NUPTK. 4445763664130202

Pembimbing 2



H. Yusran Fahmi S.IP, M.AP.

NUPTK. 6146742643130113



Ketua Program Studi Administrasi Publik

Ahmad Bailaqi, S.Sos., M.A

NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabat beliau. Syukur alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas kuliah Metode Penelitian Kualitatif yang berjudul “PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DIDESA BANJARBARU KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN”.

Dalam proses penyusunan ini, banyak sekali sumbangan pemikiran dan pemberian data-data yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Adapun pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran serta tanggapan yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan tugas ini.

Amuntai, 12 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	7
B. Tinjauan Teoritis	9
C. Kerangka Pemikiran.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Lokasi Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Tipe Penelitian	27
D. Data dan Sumber Data	28
E. Desain Operasional Penelitian	30
F. Teknik Mengumpulkan Data.....	31
G. Teknik Analisis Data.....	32
H. Uji Kredibilitas Data	33
DAFTAR PUSTAKA	36

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	29
Tabel 3.2 Desain Operasional Penelitian	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	26
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, serta usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kehadiran regulasi ini memperkuat kedudukan BUMDes sebagai entitas ekonomi yang profesional dan mandiri, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pengelolaannya. Dengan landasan tersebut, BUMDes diharapkan mampu menjadi penggerak utama perekonomian desa melalui pemanfaatan potensi lokal, peningkatan pendapatan asli desa, serta penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, pengelolaan BUMDes yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan desa yang inklusif dan berdaya saing.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong kemandirian ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran BUMDes diharapkan mampu mengelola potensi lokal secara optimal melalui kegiatan usaha yang berbasis pada kebutuhan dan karakteristik desa. Dalam konteks pembangunan desa, BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai

sarana pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Pengelolaan BUMDes memerlukan sistem manajemen yang baik, meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan yang terstruktur. Selain itu, diperlukan pula sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat. Tanpa pengelolaan yang profesional, BUMDes berpotensi mengalami stagnasi bahkan kegagalan dalam menjalankan usahanya.

Kegiatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Banjarbaru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi usaha berbasis potensi lokal desa. Kegiatan ini mencakup pengelolaan unit usaha seperti perdagangan, jasa, dan hasil pertanian, disertai administrasi dan keuangan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, dilakukan peningkatan kapasitas pengelola serta pengembangan kemitraan untuk mendukung pertumbuhan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Banjarbaru yang terletak di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, memiliki potensi sumber daya yang cukup beragam, baik dari sektor pertanian, perdagangan, maupun usaha kecil masyarakat. Potensi ini menjadi peluang besar bagi pengembangan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa. Namun demikian, dalam praktiknya, pengelolaan BUMDes di desa tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Adapun fenomena masalah yang ditemukan dalam pengelolaan BUMDes di Desa Banjarbaru adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan BUMDes. Pengurus BUMDes di Desa Banjarbaru sebagian besar belum memiliki kompetensi manajerial yang memadai, seperti dalam perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, dan pemasaran. Hal ini menyebabkan pengelolaan usaha menjadi kurang efektif dan tidak berkembang secara optimal.
2. Minimnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan BUMDes. Keberhasilan BUMDes sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat, baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha. Namun, tingkat partisipasi masyarakat di Desa Banjarbaru masih tergolong rendah, sehingga aktivitas BUMDes kurang berjalan maksimal.
3. Belum optimalnya pemanfaatan potensi lokal desa. Desa Banjarbaru memiliki berbagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, namun belum dikelola secara maksimal oleh BUMDes. Hal ini disebabkan oleh kurangnya inovasi dan strategi dalam menggali serta mengembangkan peluang usaha berbasis potensi lokal

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis pengelolaan BUMDes di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan guna mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini difokuskan pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa

Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Menurut George R. Terry dalam Afifuddin (2018: 15), menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*)
2. Pengorganisasian (*Organizing*)
3. Penggerakan (*Actuating*)
4. Pengawasan (*Controlling*)

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan:
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan BUMDes di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pengelolaan BUMDes di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan..

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Dengan mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, melalui penelitian ini penulis diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan teori-teori pengelolaan organisasi, manajemen usaha desa, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana proses dan pelaksanaan pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

b. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengelola BUMDes di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menentukan kebijakan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan usaha desa. Dengan adanya rekomendasi dari hasil penelitian ini, diharapkan BUMDes mampu mengoptimalkan potensi

yang ada guna meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat, sehingga tercipta pengelolaan usaha desa yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau *literature review* adalah suatu uraian yang berkaitan dengan teori, konsep serta temuan maupun hasil dari penelitian sebelumnya yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan atau landasan dalam penelitian serta penulisan pembahasan ini. Penelitian terdahulu bermanfaat untuk memberikan pandangan terhadap suatu permasalahan yang sama di daerah lain dan untuk dapat memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Berikut penjabaran penelitian terdahulu yang berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

1. Yulia Rantung (2021) dalam penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Kombi”. Penelitian ini dilakukan pada jurnal Agri-SosioEkonomi dengan tujuan mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan BUMDes di Kecamatan Kombi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan BUMDes ditinjau dari empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi belum berjalan optimal. Pada indikator komunikasi masih terdapat kendala dalam penyebaran informasi yang belum merata, kurang jelas, serta tidak konsisten sehingga sebagian masyarakat belum mengetahui program BUMDes. Pada indikator sumber daya, kualitas SDM

dan fasilitas sudah cukup memadai, namun masih kurang dalam pengembangan ide kreatif dan inovatif untuk memajukan ekonomi desa. Pada indikator disposisi, pengangkatan pengurus BUMDes cenderung berdasarkan kedekatan dengan pemerintah desa, bukan pada kompetensi, serta tidak adanya pemberian insentif selain gaji. Pada indikator struktur birokrasi, belum adanya SOP yang jelas menyebabkan kurangnya pedoman kerja bagi pengurus, meskipun koordinasi antar pengurus sudah cukup baik. Kesimpulannya, implementasi kebijakan pengelolaan BUMDes di Kecamatan Kombi sudah berjalan namun belum optimal dan masih memerlukan perbaikan terutama pada aspek komunikasi, profesionalisme SDM, dan kejelasan SOP.

2. Arisda Yanti & Rahmiati (2020) dalam penelitian berjudul tentang “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan BUMDes serta dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes telah berjalan namun belum optimal. Pada aspek perencanaan, program usaha yang dijalankan masih terbatas dan belum sepenuhnya berbasis potensi desa. Pada aspek pengorganisasian, struktur kepengurusan sudah terbentuk namun belum didukung oleh sumber daya manusia yang profesional. Pada aspek pelaksanaan, kegiatan usaha BUMDes sudah berjalan tetapi belum memberikan kontribusi signifikan

terhadap pendapatan masyarakat. Pada aspek pengawasan, masih kurang maksimal sehingga berdampak pada kurang efektifnya pengelolaan. Kesimpulannya, pengelolaan BUMDes perlu ditingkatkan melalui penguatan SDM, inovasi usaha, serta sistem pengawasan yang lebih baik agar mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa secara optimal.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolan

Pengelolaan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan mengelola, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan, pengurusan, dan penyelenggaraan suatu hal untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Dalam konteks organisasi maupun pemerintahan, pengelolaan tidak hanya sekadar menjalankan aktivitas, tetapi juga mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap sumber daya yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang optimal.

Sujarweni (2019:45) mengatakan: “pengelolaan merupakan suatu proses yang melibatkan serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendalian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.” Pendapat ini menegaskan bahwa pengelolaan tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan berkesinambungan, serta membutuhkan koordinasi antar unsur dalam organisasi. Dengan demikian,

pengelolaan menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap sumber daya dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Selanjutnya, Hasibuan (2017:2) mengatakan: “pengelolaan adalah ilmu dan seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.” Dari definisi tersebut terlihat bahwa pengelolaan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memerlukan keterampilan dan keahlian dalam mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajerial seseorang dalam mengelola sumber daya yang ada.

Menurut Fahmi (2018:14) mengatakan: “pengelolaan adalah suatu rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam organisasi untuk mengatur dan mengarahkan berbagai sumber daya agar tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.” Definisi ini menekankan pentingnya arah dan tujuan dalam proses pengelolaan. Tanpa adanya perencanaan yang jelas, pengelolaan akan berjalan tanpa arah dan sulit mencapai hasil yang diinginkan.

Sementara itu, Hery (2020:67) mengatakan: “pengelolaan merupakan upaya sistematis dalam mengatur, mengendalikan, dan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi guna mencapai kinerja yang optimal.” Pendapat ini memperlihatkan bahwa pengelolaan berkaitan erat dengan upaya peningkatan kinerja organisasi. Pengelolaan yang baik akan menghasilkan output yang

berkualitas dan mampu meningkatkan daya saing organisasi.

Lebih lanjut, Sedarmayanti (2017:23) mengatakan: “pengelolaan adalah suatu proses yang mencakup fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.” Definisi ini memperjelas bahwa pengelolaan identik dengan fungsi-fungsi manajemen yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu proses yang terstruktur dan berkesinambungan yang melibatkan berbagai fungsi manajemen dalam rangka mengatur dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Pengelolaan yang baik akan menghasilkan pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, serta mampu meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan menjadi aspek yang sangat penting dalam berbagai bidang, baik di sektor publik maupun swasta.

b. Tujuan Pengelolaan

Kurniawan (2020:45) menyatakan bahwa “tujuan pengelolaan adalah untuk menghindari pemborosan waktu, tenaga, dan materi dengan cara mengoptimalkan seluruh sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia, peralatan, maupun sarana pendukung lainnya.” Dalam pandangannya, setiap organisasi memerlukan pengelolaan yang baik, karena tanpa adanya pengelolaan yang terarah maka seluruh

aktivitas yang dilakukan akan berpotensi menjadi tidak efektif dan sulit mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Zulkifly (2020:78) dalam Yusuf et al. (2023:112) mengemukakan bahwa “tujuan pengelolaan atau manajemen mencakup beberapa aspek utama yang saling berkaitan, yaitu efisiensi, efektivitas, berorientasi pada tujuan organisasi, serta mendukung seluruh kegiatan operasional.” Efisiensi dimaknai sebagai kemampuan dalam menggunakan sumber daya secara hemat dan optimal tanpa pemborosan. Efektivitas berkaitan dengan kemampuan mencapai tujuan secara tepat sasaran dan tepat waktu. Selain itu, seluruh aktivitas manajerial harus bermuara pada tujuan organisasi, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan memiliki arah yang jelas. Manajemen juga berfungsi sebagai pendukung kegiatan operasional agar tujuan dapat tercapai secara maksimal.

Lebih lanjut, Yusuf et al. (2023:115) menegaskan bahwa “tujuan utama pengelolaan adalah mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui proses pengelolaan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan terhadap seluruh sumber daya, baik manusia maupun nonmanusia.” Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang dilakukan secara konsisten dan terarah.

Sementara itu, Afifuddin (2017:30) menjelaskan bahwa “tujuan manajemen adalah mengarahkan seluruh kegiatan organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien.”

Ia juga menambahkan bahwa manajemen berfungsi untuk mengatur, mengoordinasikan, serta mengawasi seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Dalam hal ini, fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling) menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pengelolaan adalah memanfaatkan seluruh sumber daya organisasi secara optimal melalui proses yang terencana dan terkoordinasi, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

c. Fungsi Pengelolaan

Menurut George R. Terry dalam Afifuddin (2018:15), fungsi pengelolaan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui kerja sama dengan orang lain. Dalam konteks penelitian ini, pengelolaan dianalisis menggunakan fungsi-fungsi manajemen klasik yang dikenal dengan konsep POAC, yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling.

1) Perencanaan (Planning)

Menurut George R. Terry dalam Afifuddin (2018:15), perencanaan adalah proses memilih dan menghubungkan fakta serta membuat dan menggunakan asumsi mengenai masa depan dalam rangka merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk

mencapai tujuan. Perencanaan mencakup penetapan visi, misi, serta strategi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.

2) Pengorganisasian (Organizing)

Menurut George R. Terry dalam Afifuddin (2018:15), pengorganisasian adalah proses pembentukan hubungan kerja yang efektif di antara individu-individu dalam organisasi sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dalam mencapai tujuan. Pengorganisasian juga bertujuan menciptakan pembagian tugas yang jelas serta koordinasi yang baik antar anggota organisasi.

3) Penggerakan (Actuating)

Menurut George R. Terry dalam Afifuddin (2018:15), penggerakan adalah usaha untuk mendorong seluruh anggota organisasi agar bersedia bekerja secara sukarela dan optimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi ini menekankan pada kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif.

4) Pengawasan (Controlling)

Menurut George R. Terry dalam Afifuddin (2018:15), pengawasan adalah proses menentukan standar pelaksanaan, menilai pelaksanaan kegiatan, serta melakukan tindakan korektif apabila terdapat penyimpangan, sehingga kegiatan yang dilakukan tetap sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam suatu organisasi, pengelolaan sumber daya manusia

menjadi bagian penting karena berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan tersebut mencakup penerapan fungsi-fungsi manajemen secara efektif, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Oleh karena itu, seluruh elemen organisasi, khususnya pengelola, perlu memfokuskan diri pada perencanaan yang matang, seperti penyusunan program pelatihan, penempatan tenaga kerja, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia tidak terlepas dari pengaruh lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi keberlangsungan dan kinerja organisasi, sehingga diperlukan pengelolaan yang adaptif dan berkelanjutan guna menghadapi perubahan serta mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang secara optimal.

2. BUMDes

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan penjelasan pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UUPD), yang dimaksud dengan badan usaha milik desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan desa, dan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan

oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, serta menjalankan berbagai jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dibentuk sebagai upaya memperkuat perekonomian desa melalui pengelolaan potensi lokal secara mandiri dan profesional, dengan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong, serta berfungsi sebagai instrumen peningkatan pendapatan asli desa dan pemberdayaan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang

sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang system usaha kapitalistis dipedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan masyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- 1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- 3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya local (local wisdom);
- 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy);
- 6) Difasilitasi oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- 7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, dan anggota).

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari pemerintah desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 213 ayat 3).

b. Tujuan pendirian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin dipedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomimasyarakat desa secara mandiri.⁴

Pada prinsipnya, pendirian BUMDes merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa, pasal 87 ayat (1) UU Desa, Pasal 132 ayat (1) PP Desa dan Pasal 4 Permendesa PDTT No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes. Frasa “dapat mendirikan BUMDes” dalam peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut menunjukkan

pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa Desa dalam gerakan usaha ekonomi.

Interpretasi sistem hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang Desa menghasilkan peta jalan pendirian BUMDes. Pendirian BUMDes didasarkan atas prakarsa Desa yang mempertimbangkan: (a) inisiatif pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa; (b) potensi usaha ekonomi Desa; (c) sumberdaya alam di Desa; (d) sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDes dan; (e) penyertaan modal dari pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

Adapun tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa;
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa;
- 3) Memberikan kesempatan usaha dan membuka lapangan kerja
- 4) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 5) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
- 6) Mendorong peran pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan.
- 7) Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat desa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengeolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif,

emansipatif, transparansi. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

c. Dasar Hukum BUMDes

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah:

1) UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Pasal 213 ayat

(1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”

2) PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa:

Pasal 78

a) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa,

b) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan,

c) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.⁸

Pasal 79

a) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah Desa.

- b) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
 - (1) Pemerintah Desa
 - (2) Tabungan Masyarakat
 - (3) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan/atau
 - (4) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- c) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Pasal 80

- a) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81

- a) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- b) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - (1) Bentuk badan hukum;
 - (2) Kepengurusan
 - (3) Hak dan kewajiban
 - (4) Permodalan

- (5) Bagi hasil usaha atau keuntungan
- (6) Kerja sama dengan pihak ketiga
- (7) Mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban.

d. Prinsip Pengelolaan BUMDes

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable, dengan mekanisme member-base dan self help yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tetap tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.

Badan Usaha Milik Desa sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari pemerintah kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten).

Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya.

Adapun karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah: (a) masyarakat desayang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki mata pencaharian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal; (b) masyarakat desa yang penghasilannya tergolong rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya, (c) masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat, dan yang terpenting adalah, (d) masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepadapemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga merekacenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa.

C. Kerangka Pemikiran

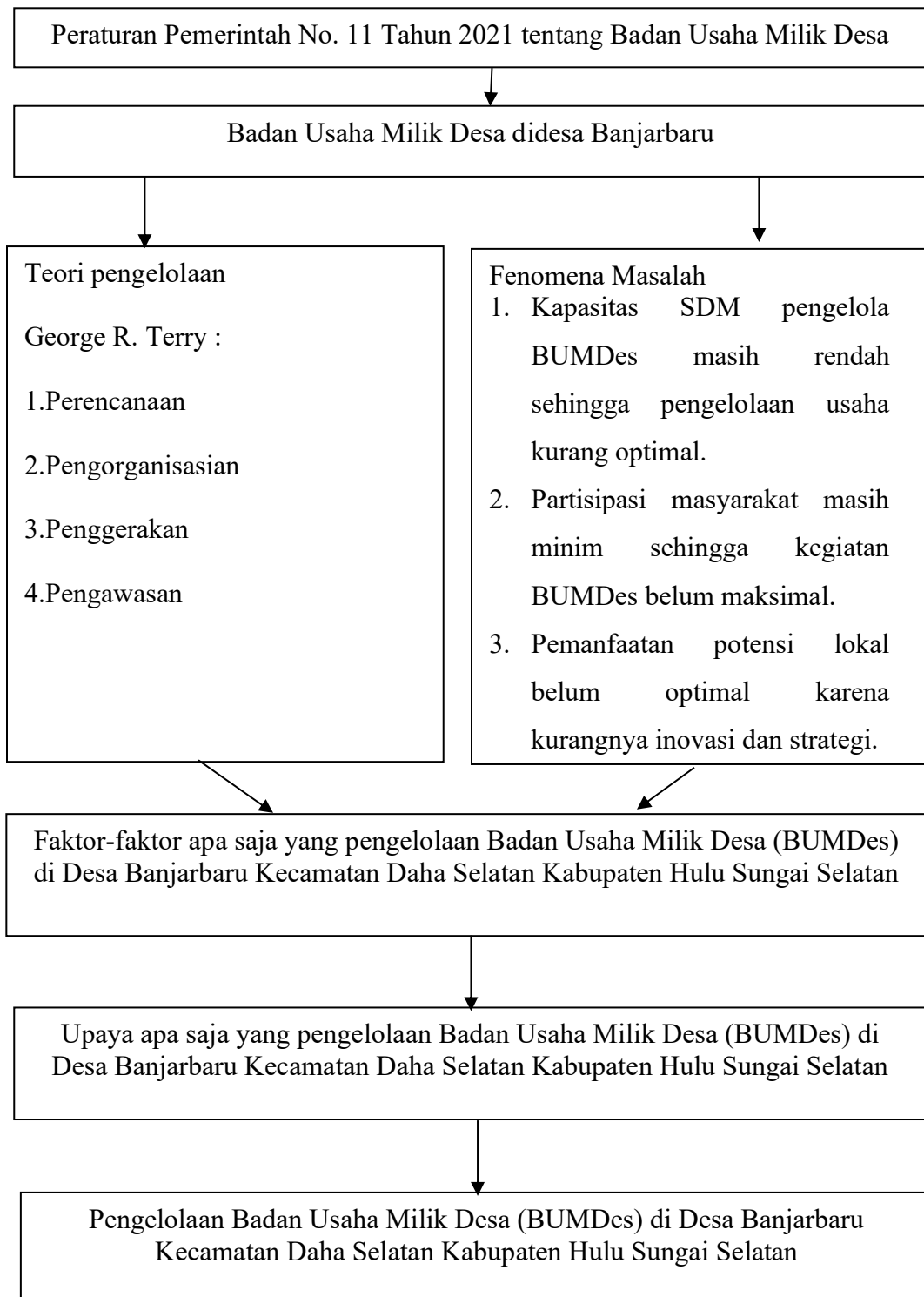
Penelitian ini bermula dari pemahaman tentang bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis proses pengelolaan BUMDes yang

dilakukan oleh pemerintah desa serta pihak-pihak terkait, serta sejauh mana pengelolaan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagai penerima manfaat. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai perencanaan usaha, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan kegiatan usaha, serta pengawasan dalam pengelolaan BUMDes.

Oleh karena itu, penelitian ini dijelaskan melalui teori pengelolaan menurut George R. Terry dalam Afifuddin (2018:15) yang menyatakan bahwa pengelolaan terdiri dari empat fungsi utama yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Keempat fungsi tersebut menjadi dasar dalam menganalisis bagaimana pengelolaan BUMDes di Desa Banjarbaru dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Adapun struktur kerangka pemikiran yang disusun oleh penulis adalah berfokus pada penerapan fungsi-fungsi manajemen tersebut dalam konteks pengelolaan BUMDes, sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan pengelolaan, serta dampaknya terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Jl. Negara Kandangan KM 1, Desa Banjarbaru, Kec. Daha Selatan, Kab. Hulu Sungai Selatan, Prov. Kalimantan Selatan

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu rancangan atau strategi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian serta mencapai tujuan penelitian secara sistematis dan terencana. Rancangan ini mencakup cara pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang selaras dengan sifat dan tujuan penelitian yang akan dilakukan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada pemahaman fenomena sosial berdasarkan makna yang utuh dari perspektif pelaku penelitian serta konteks situasi yang alami. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena yang diteliti melalui data kualitatif seperti kata-kata, tindakan, dan interpretasi subjektif, bukan sekadar angka atau generalisasi statistik.

Sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Creswell (2018:4), “penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat dari suatu fenomena atau hubungan antar fenomena yang sedang berlangsung.” Pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap dan apa

adanya mengenai objek penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan tanpa melakukan generalisasi ke populasi yang lebih luas.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terkait fenomena yang diteliti sesuai konteks dan realitas lapangan.

C. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2019:9), “metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci.” Melalui jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Moleong (2017:11), “penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.” Metode penelitian deskriptif ini ditujukan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi pada saat penelitian berlangsung dengan cara menafsirkan data yang diperoleh, seperti kondisi pengelolaan BUMDes, kemampuan sumber daya manusia, sistem manajemen usaha, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes di Desa Banjarbaru.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer (Sugiyono, 2018:456).

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai sistem pengendalian internal atas sistem dan prosedur penggajian dalam usaha mendukung efisiensi biaya tenaga kerja (Sugiyono, 2018:456).

2. Sumber Data

a. Informan

Informan dalam penelitian ini merujuk kepada individu yang memberikan wawasan dan informasi terkait permasalahan yang diteliti di lapangan, khususnya mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Teknik penarikan informan

menggunakan snowball sampling, yaitu pendekatan yang diawali dengan jumlah informan yang relatif kecil, kemudian berkembang seiring waktu. Hal ini dilakukan karena informan awal belum tentu mampu memberikan data yang lengkap, sehingga diperlukan penambahan informan untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif (Sugiyono, 2017:97).

Penentuan sumber data dalam penelitian ini juga menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap memahami dan terlibat langsung dalam pengelolaan BUMDes. Informan yang dipilih terdiri dari pengelola BUMDes, aparat desa, serta masyarakat yang terlibat atau memanfaatkan kegiatan usaha BUMDes di Desa Banjarbaru. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 12 (dua belas) orang, yang diharapkan mampu memberikan data yang relevan, mendalam, dan sesuai dengan fokus penelitian mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan
1	Kepala Desa	1 orang
2	Sekretaris Desa	1 orang
3	Ketua BUMDes	1 orang
4	Bendahara BUMDes	1 orang
5	Pengurus BUMDes	1 Orang

No	Informan	Keterangan
6	Pengurus Unit Usaha	1 Orang
7	Aparat Desa	1 Orang
8	Masyarakat	5 Orang
	Total	12 orang

b. Dokumen

Dokumen ialah informasi tertulis dan terkait dengan masalah yang diselidiki. Menurut Sugiyono (2022:124) mendefinisikan dokumen sebagai catatan tentang peristiwa yang telah terjadi pada periode sebelumnya. Dokumen bisa berupa teks, foto, atau monume bersejarah yang diciptakan oleh individu.

E. Desain Operasional Penelitian

Untuk memenuhi kualitas penelitian yang baik, penulis diwajibkan menyusun desain penelitian yang mengacu pada fokus dan aspek yang diteliti. Berkaitan dengan penelitian mengenai Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Banjarbaru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka dirancang desain operasional penelitian untuk mengukur baik atau buruknya pengelolaan BUMDes yang dilakukan.

Tabel 3.2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Pengelolaan menurut George R. Terry dalam Afifuddin (2018:15)	1. Perencanaan (<i>Planning</i>)	a. Penyusunan rencana usaha BUMDes. b. Penetapan tujuan dan strategi pengelolaan BUMDes.

Variabel	Sub Variabel	Indikator
	2. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	a. Pembagian tugas dan struktur organisasi BUMDes. b. Kesesuaian penempatan sumber daya manusia.
	3. Penggerakan (<i>Actuating</i>)	a. Pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes. b. Motivasi dan arahan kepada pengelola BUMDes.
	4. Pengawasan (<i>Controlling</i>)	a. Monitoring dan evaluasi kegiatan BUMDes. b. Tindakan koreksi terhadap penyimpangan dalam pengelolaan.

F. Teknik Mengumpulkan Data

Agar memperoleh informasi yang diinginkan pada penyusunan proposal skripsi ini, penyusun memanfaatkan sejumlah metode dalam mengumpulkan data diantaranya:

1. Observasi

Observasi ialah suatu metode yang digunakan secara langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data dengan cara mengamati. Menurut Harbani Pasolong (2016:131) observasi merujuk pada proses pengamatan secara langsung dan terstruktur terhadap fenomena yang sedang diteliti. Oleh karena itu, observasi bagian dari salah satu metode pengambilan data yang diterapkan apabila sesuai dengan sasaran

penelitian, disusun secara cermat, didokumentasikan dengan baik, serta memiliki kendali terhadap reliabilitas dan validitasnya.

2. Wawancara

Harbani Pasolong (2016:137) wawancara adalah proses interaksi langsung antara dua orang individu atau lebih yang melibatkan pertanyaan dan jawaban. Individu yang melakukan pertanyaan disebut sebagai pewawancara, sementara mereka yang memberikan jawaban tersebut sebagai responden. Wawancara bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung

3. Dokumentasi

Sugiyono (2022:124) Dokumen memperkuat penerapan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil pengamatan atau wawancara dapat ditingkatkan dengan adanya pencatatan personal seperti pengalaman masa kecil, sekolah, atau pekerjaan. Ini melibatkan pengumpulan data dari dokumen atau arsip yang relevan dengan topik yang sedang dibahas.

G. Teknik Analisis Data

Pendapat Miles, Huberman, dan Saldania (2014:31-33) menjelaskan proses analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahap:

1. Kondensasi data

Kondensasi data menunjukkan tahapan dalam mengambil pilihan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan informasi dari berbagai sumber seperti catatan dari tempat kejadian, rekaman wawancara, berkas, dan materi empiris lainnya. Dalam konteks penelitian tersebut,

peneliti melakukan kondensasi data dengan merangkum informasi. Melalui rangkuman ini, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat dihubungkan satu sama lain, memperkuat validitas data, dan memudahkan peneliti dalam menganalisis.

2. Penyajian data

Menyajikan data melibatkan pengaturan informasi agar memudahkan pembuatan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data disusun dengan cermat, langkah berikutnya adalah menyajikannya. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan melalui penulisan naratif yang menjelaskan hasil wawancara dengan informan, serta menggunakan tabel untuk memperjelas dan memudahkan pembaca dalam memahami penelitian tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir melibatkan penarikan kesimpulan dari analisis data. Interpretasi data dilakukan untuk menemukan signifikansi dari data yang telah dipresentasikan. Namun, kesimpulan yang diperoleh bersifat provisional dan bisa berubah seiring dengan ditemukannya bukti yang lebih kuat dalam proses pengumpulan data selanjutnya.. Oleh karena itu, kesimpulan tersebut perlu diverifikasi dengan meninjau ulang proses reduksi dan penyajian data sehingga kesimpulan yang diambil tetap konsisten dengan temuan dalam penelitian.

H. Uji Kredibilitas Data

Dikutip dari Sugiyono (2022:185) Kredibilitas data pada hasil penelitian kualitatif dapat dipertimbangkan melalui beberapa cara sebagai

berikut:

1. Perpanjangan pengamatan

Peneliti kembali ke lokasi penelitian, melanjutkan observasi juga wawancara dengan sumber data yang sudah dikenal sebelumnya serta yang baru ditemui. Tindakan perpanjangan observasi ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara peneliti serta narasumber, meningkatkan kesamaan persepsi (tidak ada kesenjangan lagi), meningkatkan keterbukaan, serta memperkuat saling kepercayaan, sehingga semua informasi dapat tersampaikan dengan jujur.

2. Meningkatkan ketekunan

Ketekunan yang ditingkatkan oleh peneliti tercermin dalam pengamatan yang diteliti dan berkesinambungan. Dengan meningkatnya ketekunan, data dan urutan peristiwa dapat tercatat dengan akurat dan terorganisir.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah proses mencari titik temu diantara berbagai informasi yang terhimpun untuk memverifikasi dan membandingkan data yang sudah ada.

4. Analisa pada kasus negative

Peneliti mencari data yang kontra atau berbeda dengan temuan yang telah ada. Jika tidak data yang bertentangan lagi, hal ini menandakan bahwa data yang ada dapat dipercaya.

5. Menggunakan bahan referensi

Penggunaan sumber literatur merupakan upaya untuk mendukung

validitas data yang ditemukan oleh peneliti. Misalnya, informasi diperoleh dari wawancara dapat diperkuat dengan rekaman wawancara yang telah dibuat.

6. Melakukan member *check*

Proses pengecekan mengacu pada proses verifikasi ulang data yang dikumpulkan oleh peneliti kepada sumber asalnya. Tujuannya untuk menjamin konsistensi informasi yang diperoleh dengan informasi yang diberikan informan. Penulis membuat analisis komparatif terhadap kedua sumber tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. (2018). *Manajemen: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arisda, Y., & Rahmiati. (2020). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. *Jurnal Agri-SosioEkonomi*, 5(2), 45–56.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Fahmi, I. (2018). *Manajemen Publik: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Harbani Pasolong, H. (2016). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, M. S. P. (2017). *Manajemen Dasar: Pengertian, Fungsi, dan Proses*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hery, A. (2020). *Pengelolaan Sumber Daya Organisasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kurniawan, A. (2020). *Prinsip dan Tujuan Manajemen Modern*. Surabaya: Graha Ilmu.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sedarmayanti. (2017). *Sistem Manajemen dan Pengelolaan Organisasi*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif: Pendekatan teori dan praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Manajemen Strategik dalam Organisasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Yulia, R. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Kombi. *Jurnal Agri-SosioEkonomi*, 6(1), 23–35.

Yusuf, M., Zulkifly, A., & Sari, P. (2023). Manajemen dan Pengelolaan Organisasi Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers.

Zulkifly, A. (2020). Tujuan dan Fungsi Pengelolaan Organisasi. Dalam Yusuf, M., dkk. (2023), Manajemen dan Pengelolaan Organisasi Kontemporer (hlm. 112–115). Jakarta: Rajawali Pers.